



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Maret 2016

Halaman: 9

'JANGAN BURU-BURU GADAIKAN SK' 360 Tenaga Honorer Resmi Diangkat PNS

YOGYA (KR) - Sebanyak 360 tenaga honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemkot Yogyakarta, akhirnya resmi diangkat menjadi PNS atau aparatur sipil negara. Pengangkatan tersebut seiring diserahkannya Surat Keputusan (SK) PNS terhitung sejak Senin (28/3) kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Maryoto menjelaskan, pengangkatan PNS dari jalur tenaga honorer K2 tersebut melalui tahapan cukup panjang. Dari ribuan pegawai, hanya 856 orang yang sesuai persyaratan kemudian mengikuti proses seleksi pada 2013 lalu. Dari hasil seleksi, terdapat 363 orang yang dinyatakan lolos. Namun setelah dilakukan validasi dan pemeriksaan, berkurang tiga orang yakni

dua orang mengundurkan diri dan satu orang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan masa kerja.

Pada akhir 2014 lalu, SK CPNS sudah dibagikan oleh Sekretaris Daerah. Setahun setelahnya, atau kemarin akhirnya resmi diangkat sebagai PNS. "Teknis penyerahan SK PNS akan diatur kemudian, yang pasti semua SK sudah jadi," ungkap Maryoto.

Dari total 360 orang tersebut, sebagian besar berprofesi sebagai guru.

Yakni Guru SD 102 orang, Guru SMP 27 orang, Guru SMA 16 orang, Guru SMK 58 orang, pranata laboratorium di RS Jogja 2 orang dan tenaga administrasi 155 orang. Pegawai paling muda yang diangkat menjadi PNS tersebut ialah 29 tahun, dan tertua 56 tahun.

Khusus untuk guru, bahkan ada yang sudah mengabdikan selama 30 tahun. Sedangkan untuk seleksi CPNS bagi tenaga honorer K2 lainnya, hingga kini belum ada ketentuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berseloroh agar SK PNS yang baru saja diterima tidak perlu buru-

buru untuk digadaikan. Diakuinya, banyak PNS yang menggadaikan SK untuk keperluan utang. Tapi hal itu sepenuhnya tetap menjadi kewenangan tiap individu pegawai. "Silakan saja, karena utang itu wajar guna memenuhi kebutuhan. Namun harus dan wajib untuk membayar. Yang penting, jangan sampai kewajiban itu menjadi hak, atau sebaliknya yang hak justru jadi kewajiban," selorohnya.

Pada kesempatan itu, Haryadi juga berpesan agar para PNS yang baru diangkat mampu menjadi panutan bagi pegawai lain. Dirinya pun tidak akan mentolerir bagi bawahannya yang melakukan tindakan korupsi serta menyalahgunakan wewenang.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005